



PIDATO
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENGANTAR DAN KETERANGAN PEMERINTAH
ATAS
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN
POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL
TAHUN ANGGARAN 2021
DI DEPAN RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, Mei 2020

Bismillahirrahmaanirrahiim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat pagi, Salam sejahtera bagi kita semua,

Om Swastiastu, Namu Buddhaya,

Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Pertama-tama marilah kita mengagungkan nama Allah, Tuhan Semesta Alam. Tuhan Yang Maha Perkasa dengan kekuasaan-Nya yang meliputi segala penjuru langit dan bumi. Saat ini umat manusia di seluruh dunia tengah menghadapi bencana kesehatan dan kemanusiaan, pandemi Covid-19, yang telah mengakibatkan korban jiwa manusia dan mengubah sangat fundamental aktivitas dan interaksi sosial ekonomi manusia. Namun sebagai umat beragama, kita harus percaya bahwa tidak ada ujian yang tidak membawa hikmah. Dan kita pun harus yakin bahwa dalam setiap kesukaran pasti ada kemudahan. Oleh karena itu, marilah kita seluruh komponen bangsa, mengokohkan ikatan kegotong-royongan dan solidaritas sesama, mengokohkan rasa perikemanusiaan untuk bersatu menghadapi pandemi Covid-19 dengan terus melipatgandakan ikhtiar dan doa agar kita mampu mengatasi tantangan ini dengan sebaik-baiknya.

Ibu, Bapak, Para Anggota Dewan yang kami muliakan,

Atas nama Pemerintah, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota dewan, yang telah memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menyampaikan Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi

Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2021. Dokumen ini akan digunakan sebagai bahan Pembicaraan Pendahuluan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2021.

Dokumen KEM-PPKF Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu kepada Arah Pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020. Namun dengan terjadinya pandemi global Covid-19 sejak awal tahun 2020, menyebabkan perlunya penyesuaian fundamental dalam pengelolaan perekonomian nasional yang berdampak pada keuangan negara. KEM-PPKF 2021 disusun di tengah pandemi Covid-19 yang mencerminkan berbagai ketidakpastian tinggi akibat penyebaran Covid-19 secara global, yang masih belum dapat dipastikan kapan dan bagaimana akan dapat diatasi. Semua negara melakukan berbagai upaya luar biasa dan langkah kebijakan di bidang kesehatan yang berimplikasi luas di bidang sosial, ekonomi, dan keuangan. Semua negara saling melihat dan mengkaji untuk menetapkan langkah yang paling tepat bagi negaranya, mengambil pelajaran dari pengalaman negara yang dianggap sukses.

Hadirin yang saya muliakan,

Pandemi Covid-19 dalam waktu empat bulan telah menjalar sangat cepat dan menyebabkan jumlah penderita di dunia mencapai 4 juta orang dan jumlah korban meninggal mencapai lebih dari 270 ribu jiwa, pada posisi awal Mei 2020. Di Indonesia, jumlah terinfeksi mencapai 13.000 dengan jumlah meninggal dunia mencapai 1.000 orang. Hingga saat ini jumlah penderita dan korban masih meningkat cepat dan menyebar luas.

Untuk mencegah penyebaran Covid-19, berbagai langkah dilakukan di hampir semua negara. Pembatasan sosial (*physical distancing*), berupa larangan perjalanan, penutupan perbatasan, penutupan sekolah, kantor, dan tempat ibadah bahkan isolasi suatu wilayah pun dilakukan. Berbagai langkah ekstrim ini menyebabkan aktivitas manusia turun drastis. Aktivitas ekonomi terganggu dari dua sisi sekaligus, baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran. Tingkat konsumsi tertekan, tingkat produksi terkendala, dan rantai pasok global terganggu; semua itu berujung pada penurunan *output* global yang sangat besar.

Pandemi Covid-19 dan langkah penanganan serta dampaknya telah menyebabkan kepanikan di pasar keuangan. Tingkat kecemasan investor di pasar saham menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah. Negara-negara berkembang mengalami arus modal keluar yang sangat besar. Investor mencari aset yang aman, memindahkan aset keuangannya ke *safe-haven assets*, yaitu emas dan dolar. Angka arus modal keluar di Indonesia jauh lebih besar dibandingkan dengan periode krisis keuangan global tahun 2008 dan *taper tantrum* 2013.

Pandemi Covid-19 telah menciptakan ancaman nyata bagi keselamatan rakyat, ancaman terhadap sosial ekonomi dan sistem keuangan. Kegentingan yang sangat tinggi menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengeluarkan Perppu No. 1/2020, yang berisi landasan hukum bagi langkah dan kebijakan di bidang Keuangan Negara dan APBN serta dalam menjaga sistem keuangan nasional.

Dampak Covid-19 terlihat nyata melalui berbagai indikator. Pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan akan merosot sangat tajam dan mengalami resesi di tahun 2020. Pada bulan Januari 2020, IMF masih optimis dengan proyeksi ekonomi global di tahun 2020 yang akan tumbuh 3,3 persen, namun pada bulan

April 2020 - akibat Covid-19, proyeksi dikoreksi tajam menjadi minus 3,0 persen. Artinya proyeksi ekonomi dunia mengalami kemerosotan lebih dari 6 persen, potensi *output* yang hilang ini lebih besar dari perekonomian Jepang. Pada kuartal I 2020, berbagai negara telah mengalami pertumbuhan negatif: Tiongkok -6,8 persen, Perancis -5,4 persen, dan Singapura -2,2 persen. Indonesia masih tumbuh positif 2,97 persen, meski ini juga merupakan koreksi yang cukup tajam.

Dampak dari resesi global, banyak masyarakat yang tidak bisa bekerja dan terancam kehilangan sumber pendapatannya. Jika tidak diantisipasi dengan segera, kondisi ini akan menjalar ke sektor keuangan, meningkatkan kredit bermasalah atau bahkan berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Untuk mencegah hal tersebut, seluruh dunia mengambil langkah-langkah luar biasa untuk menyelamatkan manusia dan perekonomian. Stimulus fiskal dalam jumlah yang sangat besar disiapkan. Singapura, Amerika Serikat, dan Malaysia telah mengeluarkan stimulus dan dukungan fiskal yang mencapai lebih dari 10 persen PDB-nya. Langkah kebijakan di berbagai negara dapat dikelompokkan dalam empat kategori yaitu: penanganan langsung dampak Covid-19 di sektor kesehatan, perluasan *social safety net*, stimulus untuk membantu pemulihan dunia usaha, dan perlindungan terhadap stabilitas sistem keuangan.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Situasi pandemi dan ketidakpastian yang tinggi mengharuskan Pemerintah untuk mempersiapkan beberapa skenario perkembangan ekonomi ke depan. Pertumbuhan ekonomi kuartal I yang hanya sebesar 2,97 persen menunjukkan telah terjadi koreksi yang cukup tajam. Hal ini mengindikasikan tekanan lebih berat akan dialami sepanjang tahun 2020, yang artinya pertumbuhan ekonomi terancam bergerak dari skenario berat sebesar 2,3

persen menuju skenario sangat berat yaitu kontraksi -0,4 persen. Untuk itu, langkah dan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonomi harus terus diperkuat dan dilaksanakan dengan efektif agar pemburukan lebih lanjut dapat diminimalkan.

Pemerintah menyadari, pemulihan kesehatan adalah prioritas dan prasyarat terjadinya pemulihan sosial ekonomi. Oleh karena itu, APBN 2020 dilakukan *refocusing* dan realokasi untuk menangani tiga prioritas utama, yaitu: (1) penanganan kesehatan, (2) perluasan jaring pengaman sosial untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan, dan (3) menjaga daya tahan dunia usaha dan mendukung pemulihan aktivitas ekonomi.

Ibu, Bapak, Para Anggota Dewan yang kami muliakan,

Belajar dari sejarah pandemi Flu Spanyol tahun 1918 yang berlangsung hingga 18 bulan, Covid-19 juga diperkirakan akan berlangsung tidak singkat, yang akan mengakibatkan perlemahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun kita tidak boleh patah semangat dan kehilangan orientasi. Justru dengan adanya krisis pandemi Covid-19, harus dapat dimanfaatkan untuk melakukan reformasi di berbagai bidang. Upaya pemulihan dan reformasi bidang kesehatan, sosial dan ekonomi harus dimulai bersama dengan penanganan pandemi. Dan hal ini akan berlangsung hingga 2021. Dengan demikian, kebijakan ekonomi makro dan arah kebijakan fiskal di tahun 2021 akan berfokus pada upaya-upaya pemulihan ekonomi sekaligus upaya reformasi untuk mengatasi masalah fundamental ekonomi jangka menengah-panjang menuju Visi Indonesia Maju 2045.

Sejak penyebaran Covid-19 telah dilakukan berbagai langkah untuk menangani dampak negatif pada masyarakat dan memulihkan ekonomi. Langkah perluasan bantuan sosial untuk melindungi masyarakat miskin dan

terdampak, termasuk yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja. Dunia usaha terutama usaha kecil dan menengah juga mendapatkan dukungan pemerintah berupa penundaan pinjaman dan bantuan subsidi bunga pinjaman. Langkah ini diharapkan mampu menambah ketahanan dunia usaha menghadapi tekanan Covid-19 yang sangat berat. Pemerintah juga sedang dan akan melakukan langkah pemulihan ekonomi seperti yang diatur dalam Perppu No. 1/2020 yaitu melalui belanja negara, penempatan dana pemerintah, penjaminan, dan penanaman modal negara.

Sementara proses pemulihan ekonomi terus diupayakan dan akan berlangsung, Indonesia perlu melakukan reformasi untuk keluar dari *Middle Income Trap* melalui peningkatan produktivitas dan daya saing. Untuk meningkatkan produktivitas, Indonesia masih perlu terus memperbaiki *gap* infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adopsi teknologi. Di sisi daya saing, banyak hal yang masih perlu dibenahi, antara lain iklim usaha yang kurang kondusif untuk investasi, birokrasi dan regulasi yang belum efisien, serta *high cost economy* yang menghambat daya saing ekspor. Terkait hal ini, kualitas SDM atau tenaga kerja selalu menjadi bagian sentral dalam peningkatan produktivitas maupun daya saing Indonesia.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, Presiden telah memberikan lima arahan strategis yang sangat relevan, yaitu: pembangunan kualitas SDM, melanjutkan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi, serta transformasi ekonomi. Akselerasi pembangunan infrastruktur telah berjalan; perlu dijaga keberlanjutannya. Peningkatan kualitas SDM adalah keharusan memasuki era baru, era *knowledge economy* atau era industri 4.0. Perekonomian Indonesia harus mengalami transformasi menuju *knowledge economy*. SDM-nya harus berkualitas, infrastrukturnya harus

mendukung, iklim usaha harus dipermudah. Oleh karena itu, reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi menjadi kunci.

Dengan perspektif ini maka kebijakan fiskal tahun 2021 mengangkat tema **“Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi.”** Tema ini selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 yaitu **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”**, dengan fokus pembangunan pada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional dan jaring pengaman sosial serta reformasi sistem ketahanan bencana. Fokus pembangunan ini diharapkan mampu menghidupkan kembali mesin ekonomi nasional yang sedang berada dalam momentum pertumbuhan.

Dengan mempertimbangkan segala risiko dan ketidakpastian yang ada, serta potensi pemulihan ekonomi global dan nasional di tahun depan, Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN 2021 adalah sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 4,5-5,5 persen; inflasi 2,0-4,0 persen; tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,67-9,56 persen; nilai tukar Rupiah Rp14.900-Rp15.300/US\$; harga minyak mentah Indonesia US\$40-50/barel; *lifting* minyak bumi 677-737 ribu barel per hari; dan *lifting* gas bumi 1.085-1.173 ribu barel setara minyak per hari.

Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat,

Dengan fokus kepada pemulihan ekonomi dan tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang maka reformasi diarahkan pada bidang kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), serta belanja negara. Di bidang kesehatan, reformasi diarahkan untuk mendukung percepatan pemulihan Covid-19, sinergi/koordinasi Pusat dan Daerah, peningkatan layanan kesehatan termasuk *health security preparedness*,

dan reformasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC). Di bidang perlindungan sosial, reformasi diarahkan untuk integrasi dan sinergi antarprogram agar menjamin ketepatan sasaran dan peningkatan efektivitas. Ini menjadi langkah penting untuk menciptakan program perlindungan sosial yang komprehensif, berbasis siklus hidup, termasuk untuk mengantisipasi *aging population*.

Di bidang pendidikan, tantangan terbesar adalah kualitas pendidikan yang belum optimal. Skor PISA yang terus menurun sejak 2009, kompetensi guru antarprovinsi belum merata, dan porsi perhatian *golden moment* Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) belum memadai. Persoalan *miss-match* keterampilan dengan kebutuhan dunia kerja juga perlu diatasi. Untuk itu, upaya reformasi diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan nasional antara lain dengan transformasi kepemimpinan sekolah; transformasi pendidikan dan guru; penyederhanaan kurikulum; adopsi standar global dan pengokohan karakter bangsa; serta kemitraan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sipil.

Dampak Covid-19 membuka fakta perlunya dilihat kembali pola hubungan Pusat-Daerah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Langkah-langkah penanganan Covid-19 menunjukkan betapa pentingnya sinergi fiskal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sebagai bagian dari keuangan negara, maka keuangan daerah mempunyai tanggung jawab yang sama dalam mendukung tujuan nasional. Volume TKDD yang terus meningkat dari tahun ke tahun harus diikuti dengan perbaikan pelayanan publik di seluruh daerah. Fakta bahwa masih terdapat kesenjangan dalam penyediaan pelayanan dasar publik antardaerah dan ketimpangan pembangunan memberikan isyarat mutlak untuk mencari format terbaik alokasi anggaran pusat-daerah agar tercapai konvergensi pencapaian pembangunan nasional.

Realokasi dan refocusing yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah di 2020 menyadarkan kita bahwa anggaran belanja APBN dan APBD masih bisa dikelola dengan lebih baik lagi. Reformasi anggaran belanja akan terus dilakukan melalui penajaman fokus prioritas (*zero-based budgeting*), beorientasi hasil (*result-based budgeting*), dan perlu alokasi yang bersifat antisipatif (*automatic stabilizer*) sebagai *shock-absorber* otomatis dalam menghadapi ketidakpastian. Dengan upaya-upaya perbaikan prioritas belanja dan reformasi penganggaran, belanja negara di tahun 2021 diperkirakan berada dalam kisaran 13,11–15,17 persen terhadap PDB.

Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat,

Reformasi di sektor kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, TKDD, serta proses penganggaran harus didukung dengan reformasi di sisi penerimaan perpajakan. Kebijakan perpajakan 2021 diarahkan antara lain pada pemberian insentif yang lebih tepat, relaksasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, optimalisasi penerimaan melalui perluasan basis pajak, serta peningkatan pelayanan kepabeanan dan ekstensifikasi barang kena cukai. Dengan adanya kebutuhan untuk mempercepat pemulihan ekonomi melalui tambahan insentif perpajakan (*tax expenditure*) dan aktivitas ekonomi yang masih dalam proses pemulihan maka angka rasio perpajakan tahun 2021 diperkirakan dalam kisaran 8,25–8,63 persen terhadap PDB. Konsistensi dalam melakukan reformasi perpajakan dan pemulihan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan rasio perpajakan secara bertahap di masa yang akan datang.

Sementara itu, kebijakan PNBPN 2021 diarahkan untuk melanjutkan proses reformasi sejalan dengan amanat UU No. 9 Tahun 2019 tentang PNBPN. Langkah reformasi dilakukan dengan pengelolaan penerimaan sumber daya alam agar

memberi manfaat jangka panjang, peningkatan kualitas layanan, dan optimalisasi aset dengan penerapan *highest and best use* (HBU). Namun, lemahnya harga komoditas diproyeksikan akan menekan PNBPN, sehingga rasio PNBPN di tahun 2021 diprakirakan dalam kisaran 1,60–2,30 persen terhadap PDB.

Selanjutnya, kebijakan sisi pembiayaan tahun 2021 diarahkan untuk mendukung *countercyclical* stabilisasi ekonomi. Berbagai langkah dilakukan: (1) peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM, UMI, dan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah; (2) pendalaman pasar, efisiensi *cost of borrowing*, dan efektivitas quasi fiskal untuk akselerasi daya saing dan peningkatan ekspor; serta (3) dukungan restrukturisasi BUMN, penguatan BLU dan *Sovereign Wealth Fund* untuk mendukung pemulihan ekonomi dan akselerasi pembangunan.

Pembiayaan dilakukan secara terukur dan berhati-hati dengan terus menjaga sumber-sumber pembiayaan yang berkelanjutan (*sustainable*) agar rasio utang terjaga dalam batas aman. Pemerintah terus mendorong peran swasta dalam pembiayaan pembangunan melalui kerangka Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), termasuk mendorong penerbitan instrumen pembiayaan kreatif lainnya. Kebijakan makro-fiskal tahun 2021 dirumuskan sebagai kebijakan fiskal ekspansif konsolidatif dengan defisit pada kisaran 3,21–4,17 persen terhadap PDB serta rasio utang di kisaran 36,67–37,97 persen terhadap PDB. Besaran pembiayaan defisit di atas 3 persen ini mengacu kepada Perppu No. 1/2020, agar proses pemulihan berjalan secara bertahap dan tidak mengalami *hard landing* yang berpotensi memberikan guncangan bagi perekonomian. Hal ini mengingat, kebijakan fiskal menjadi instrumen yang sangat strategis dan vital dalam proses pemulihan ekonomi.

Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat,

Demikianlah Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021 yang telah kami susun dengan mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 yang masih menimbulkan ketidakpastian yang tinggi. Selanjutnya kami mengharapkan dukungan, masukan, dan kerja sama seluruh anggota Dewan yang terhormat dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Sungguh bersama kesulitan ada banyak kemudahan”. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan-Nya, untuk dapat melewati masa-masa sulit sekarang ini. Semoga kita diberikan kekuatan untuk dapat melaksanakan tugas dan amanah, melayani seluruh rakyat Indonesia dalam upaya menuju bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Amin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Jakarta, 12 Mei 2020

Atas nama Pemerintah Republik Indonesia

Menteri Keuangan,

ttd

Sri Mulyani Indrawati